

SKRIPSI

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP *STUNTING* MELALUI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA

HAROL MASALLE



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP STUNTING MELALUI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh :

**HAROL MASALLE
A011191094**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP STUNTING MELALUI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh :

HAROL MASALLE

A011191094

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 17 Oktober 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. H. Madris, DPS., M.Si., CWM
NIP. 19601231 198811 1 001

Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Sabir, S.E., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP STUNTING MELALUI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh :

HAROL MASALLE

A011191094

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 17 Oktober 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Madris, DPS., M.Si., CWM®	Ketua	1. 
2.	Dr. Sabir, SE., M.Si.,CWM®	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA	Anggota	3. 
4.	Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si.,CWM	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®

NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : HAROL MASALLE

Nomor Pokok : A011191094

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap *Stunting* Melalui Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 17 Oktober 2023

Yang menyatakan



Harol Masalle

A011191094

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP *STUNTING* MELALUI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”**. Skripsi ini merupakan karya penulis untuk memenuhi syarat agar mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa banyak keterbatasan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia dan rahmatnya, penulis boleh tetap dalam keadaan yang sehat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis, Samma Patanan dan Elisabet Pasama, penulis sangat berterimakasih atas didikan, motivasi, semangat, kepercayaan, serta doa yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan waktu yang baik. Untuk adik saya tercinta, Eben, Elsa, Habel dan Hary terimakasih sudah menjadi kebanggaan dan salah satu alasan bagi penulis dalam mengejar impian.
3. Bapak Dr. H. Madris, DPS., M.Si., CWM® dan Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping penulis. Terimakasih atas banyaknya saran dan masukan bagi penulis

dalam mewujudkan skripsi ini, penulis berdoa agar sekiranya pak madris dan pak sabir boleh tetap dalam keadaan yang baik dan sehat selalu.

4. Prof. Dr. Rahmatia., S.E., MA dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun selama proses ujian seminar proposal dan juga seminar hasil, saran dan kritik yang diberikan kepada penulis merupakan ilmu baru oleh penulis.
5. Seluruh Dosen Ilmu Ekonomi FEB-UNHAS yang telah memberikan ilmu pengetahuan, nasehat dan arahan selama penulis menempuh pendidikan, semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan agar tetap dapat berdedikasi tinggi dalam membagikan ilmu dan pengajaran kepada mahasiswa-mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB-UNHAS.
6. Sahabat terkasih penulis dari awal masuk dunia perkuliahan sampai saat ini, Muh. Alif Febri Ramli, Rendi Kumar Sahbastian, Muhammad Rafli, Mega Utami, Erianti Asi Safitri, Nanda Bahtiar, Uswatun Hasanah Tallesang. Terimakasih atas segala bantuan, dukungan, dan motivasinya serta apapun bantuan yang membuat penulis bangga memiliki sahabat seperti kalian. Sekali lagi terimakasih telah menemani penulis baik dalam keadaan sedih maupun senang. Semoga persahabatan kita terus terjalin hingga akhir hayat.
7. Teman-teman Ilmu Ekonomi 2019 (GRIFFINS) yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan semangat hingga penulis bisa berada pada titik ini. Terimakasih telah kebersamai penulis bisa berproses sebagai mahasiswa di FEB_UNHAS.

8. Teman-teman Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (PMKO FEB-UH), terkhususnya Andre, Betran, Fito, Gimas, Johadiputra, Iman, Yolanda, Gracia, Yusli, Gabriel dan nama lain yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas pengalaman dan kebersamaannya yang turut mewarnai lika-liku kehidupan penulis selama di kampus.
9. Teman-teman Ruchell Fams dan Jumat gengs yang telah memberikan semangat dan motivasi juga kebersamaai penulis dalam menjalani masa-masa perkuliahan.
10. Teman-teman KKN UH 108 Pulau Sarappo, Eri, Eril, Dian, Eply, Kwan, Maya, Iqfa, Irham, Dimas, Gilang, Akbar dan Geo. Terimakasih telah menjadi teman yang baik bagi penulis selama menjalani kegiatan KKN.
11. Teman-teman kabinet Prioritas dan terkhususnya departemen Keilmuan dan Advokasi atas nama Mario, Yola, Eri, Cia, Angel dan Ardi. Terimakasih telah menjadi partner yang baik selama masa kepengurusan di HIMAJIE.
12. Staff Departemen Ilmu Ekonomi, Pak Oscar dan Ibu Dama, terima kasih karena telah membantu saya selama saya mengurus berkas-berkas di departemen.

Makassar, 17 Oktober 2023



Harol Masalle

ABSTRAK

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP *STUNTING* MELALUI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA

Harol Masalle

Madris

Sabir

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih sangat sering ditemukan terjadi dalam masyarakat. *Stunting* dalam jangka panjang dan dalam skala besar dapat memberikan dampak yang berkelanjutan yang bukan hanya akan dirasakan oleh individu yang mengalaminya namun juga akan berdampak terhadap berlangsungnya perekonomian dan pembangunan suatu negara. Di Indonesia sendiri Prevalensi *Stunting* masih berada diatas 20 persen yang mana angka tersebut masih jauh dari acuan batas normal *Stunting* yang ditentukan oleh World Health Organization (WHO). Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi dan juga kualitas sumber daya manusia dalam membantu mengurangi tingkat *Stunting* yang ada di Indonesia. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan kurun waktu 2007-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap *Stunting*. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah dalam bidang ekonomi dan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap *Stunting* di Indonesia.

Kata Kunci: *Stunting*, Pengeluaran Pemerintah, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF GOVERNMENT EXPENDITURE ON STUNTING THROUGH HUMAN RESOURCE QUALITY IN INDONESIA

Harol Masalle

Madris

Sabir

Stunting is one of the prevalent health problems commonly found in societies. In the long term and on a large scale, stunting can have sustained impacts that not only affect the individuals experiencing it but also have repercussions on the economy and development of a country. In Indonesia, the prevalence of stunting remains above 20 percent, which is far from the normal stunting threshold determined by the World Health Organization (WHO). Therefore, this study aims to analyze the influence of government expenditure in the fields of health, education, and the economy, as well as the quality of human resources, in helping to reduce the level of stunting in Indonesia. The data analysis utilized multiple linear regression for the period of 2007-2021. The research findings indicate that government expenditure variables in the fields of health and education significantly affect stunting. However, government expenditure variables in the field of the economy and the quality of human resources do not significantly affect stunting in Indonesia.

Keywords: Stunting, Government Expenditure, Health, Education, Economy, and Human Resource Quality.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 <i>Stunting</i>	8
2.1.2 Kualitas sumber daya manusia	11
2.1.3 Pengeluaran pemerintah	14
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	18
2.2.1 Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan <i>Stunting</i>	18
2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan dengan kualitas sumber daya manusia dan <i>Stunting</i>	20
2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia dan <i>Stunting</i>	20
2.2.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi dengan Kualitas Sumber Daya Manusia dan <i>Stunting</i>	21
2.3 Studi Empiris.....	22
2.4 Kerangka Pikir Penelitian	25
2.5 Hipotesis Penelitian.....	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	28
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.3 Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data	28
3.4 Definisi Operasional Penelitian	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Perkembangan Variabel.....	34
4.1.1 Perkembangan <i>Stunting</i> di Indonesia	34
4.1.2 Perkembangan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia	36
4.1.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia.....	39
4.2 Hasil Estimasi Data	40
4.2.1 Hasil estimasi pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia	40
4.2.2 Hasil estimasi pengaruh langsung kualitas sumber daya manusia dan pengeluaran pemerintah terhadap <i>stunting</i>	42
4.2.3 Hasil estimasi pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap <i>stunting</i> melalui kualitas sumber daya manusia.....	43
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	45
4.3.1 Pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan terhadap <i>Stunting</i> baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas sumber daya manusia	45
4.3.2 Pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan terhadap <i>Stunting</i> baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas sumber daya manusia	47
4.3.3 Pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bidang ekonomi terhadap <i>Stunting</i> baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas sumber daya manusia	49
4.3.4 Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap <i>stunting</i>	50
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prevalensi stunting anak usia lima Tahun di ASEAN Tahun 2020.	2
Tabel 1.2 Pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan dan prevalensi stunting di Indonesia Tahun 2015-2021	3
Tabel 4.1 Prevalensi stunting provinsi di Indonesia Tahun 2022	34
Tabel 4.2 Komponen penyusun IPM Indonesia Tahun 2018-2022	37
Tabel 4.3 Pengeluaran pemerintah Tahun 2017-2021	39
Tabel 4.4 Hasil estimasi pengaruh langsung pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya terhadap kualitas sumber daya manusia.....	41
Tabel 4.5 Hasil estimasi pengaruh langsung kualitas sumber daya manusia, pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan dalam lainnya terhadap <i>stunting</i>	42
Tabel 4.6 Hasil estimasi pengaruh tidak langsung pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lainnya terhadap <i>stunting</i> melalui kualitas sumber daya manusia.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	27
Gambar 3.1 Model struktural pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya terhadap stunting melalui kualitas sumber daya manusia	29
Gambar 4.1 Jumlah penduduk miskin Indonesia Tahun 2018-2022.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berjalannya perekonomian dan pembangunan suatu negara tidak pernah terlepas dari aktivitas manusia sebagai pelaku utama penggerak ekonomi. Hal ini menjadi alasan mengapa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sangat penting untuk menentukan kemana arah perekonomian kedepannya. Salah satu permasalahan terkait SDM yang terjadi di negara-negara berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak termasuk Indonesia adalah masalah *stunting*.

Stunting merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari pada anak-anak seusianya (Kemenkes RI 2018). *Stunting* adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (*Z-Score*) kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD (Pendek/ *Stunted*) dan kurang dari -3 SD (Sangat pendek/ *Severely stunted*). *Stunting* dapat terjadi mulai dari janin masih dalam kandungan dan baru akan kelihatan ketika anak menginjak usia dua tahun. *Stunting* dibentuk oleh *growth faltering* dan *catch up growth* yang tidak memadai sehingga dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan optimal seorang anak, hal ini mencerminkan bahwa kelompok balita yang lahir dengan berat badan yang normal masih memiliki potensi untuk mengalami *Stunting* bila pemeruan kebutuhan gizi selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik (Kemenkes RI 2016).

Menurut WHO (2018), dalam jangka pendek *stunting* dapat mempengaruhi perkembangan kognitif atau kecerdasan, motorik dan verbal seorang anak. Perkembangan kognitif seorang anak sangatlah penting karena berkaitan dengan pola perubahan dalam proses perkembangan mental yang meliputi kemampuan belajar, pemusatan perhatian, berfikir, kreatifitas dan bahasa. Sedangkan dalam jangka panjang, *stunting* dapat menyebabkan postur tubuh seorang anak tidak akan optimal pada saat dewasa nanti termasuk kemungkinan terkena obesitas dan penyakit degeneratif lainnya, menurunkan kesehatan reproduksi, tidak optimalnya kapasitas belajar dan performa saat masa sekolah dan tidak maksimalnya produktivitas ketika bekerja.

Tabel 1.1
Prevalensi Stunting anak usia lima Tahun di ASEAN Tahun 2020

Negara	Prevalensi Stunting
Singapura	2,8
Thailand	12,3
Malaysia	20,9
Filipina	28,7
Indonesia	31,8
Timor Leste	48,8

Sumber : Databoks (Asian Development Bank) data diolah 2023

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*) melaporkan prevalensi anak penderita *stunting* usia dibawah lima tahun di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara pada tahun 2020 yang mencapai angka 31,8%. Angka ini jauh lebih besar dari negara-negara terdekat Indonesia seperti Malaysia, Thailand dan Filipina. Tingkat *Stunting* terbesar sendiri ada di Timor Leste dengan angka 48,8% dan terendah di negara Singapura yang bahkan dibawah 5% yaitu sebesar 2,8%.

Tabel 1.2

Pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan dan Prevalensi Stunting di Indonesia Tahun 2015 – 2021

Tahun	Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (Milliar Rupiah)	Prevalensi Stunting (Persen)
2015	51,426.3	29
2016	59,639.0	27,54
2017	57,225.1	29,06
2018	61,869.7	30,08
2019	71,006.9	27,67
2020	105,088.5	26,92
2021	111,666.7	24,04

Sumber : Kemenkeu, Riskesdas Indonesia diolah, 2023

Berdasarkan data dari Pemantauan Status Gizi (PSG) dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, prevalensi *stunting* di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 *stunting* Indonesia berada di angka 29% dan mengalami penurunan ditahun 2016 menjadi 27,54% namun mengalami kenaikan di tahun 2017 dan 2018 menjadi 30,08% sebelum akhirnya kembali turun di tahun 2019 hingga tahun 2021 menjadi 24,04%. Penurunan *stunting* yang terjadi ini belum bisa dikategorikan sebagai hasil yang sangat memuaskan karena WHO sendiri menyatakan bahwa *stunting* suatu negara masih dianggap kronis bila masih berada diatas 20%. Target pemerintah Indonesia sendiri adalah untuk menurunkan *stunting* hingga mencapai 14% pada tahun 2024 sementara pada tahun tahun 2021 *stunting* Indonesia masih sebesar 24,04%. *Stunting* yang terjadi di Indonesia tidak hanya dialami oleh rumah tangga/keluarga yang miskin dan kurang mampu melainkan juga dialami oleh keluarga yang tidak miskin atau yang berada diatas 40% tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan RI,2017).

Permasalahan *stunting* tidak hanya berdampak pada setiap individu yang mengalaminya, namun dalam skala besar *stunting* dapat memberikan dampak yang sangat buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara termasuk meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Catatan Bank Dunia (2016) menyatakan bahwa dalam jangka panjang *Stunting* dapat menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Jika PDB Indonesia sebesar Rp13.000 triliun, diperkirakan potensi kerugian akibat *Stunting* dapat mencapai Rp260 triliun sampai 390 triliun per tahun.

Berdasarkan pernyataan BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 – 2045. Artinya bahwa pada kurun waktu tersebut kondisi masyarakat Indonesia akan didominasi oleh usia produktif (usia 15-64 tahun) dibandingkan usia non produktif. BPS memperkirakan jika setidaknya sekitar 64% usia produktif dari total penduduk yang diproyeksikan yakni 297 juta jiwa. Hal yang sangat ditakutkan ketika bonus demografi itu terjadi adalah ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas sumber daya manusia yang harus bersaing secara ketat. Masalah *stunting* yang hingga kini belum terselesaikan tentunya menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Pemerintah selama ini telah melakukan banyak upaya dalam memperkecil angka *stunting* di Indonesia salah satunya adalah melalui pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pada tahun 2022 pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar Rp.44,8 triliun untuk program percepatan pencegahan *stunting*. Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang tersebar di 17 kementerian dan lembaga sebesar Rp.34,1 triliun dan untuk pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

fisik sebesar Rp.8,9 triliun dan DAK non fisik sebesar Rp.1,8 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui lembaga yang ditugaskan menangani permasalahan *stunting* demi menciptakan lingkungan kerja, rumah tangga dan kesehatan yang lebih baik. Stunting pada dasarnya tidak hanya terjadi karena kekurangan gizi melainkan juga karena beberapa alasan yang cukup kompleks, seperti pendapatan keluarga yang tidak mencukupi, kesehatan juga kesiapan orang tua dalam memiliki dan mengasuh anaknya, lingkungan tempat tinggal yang kurang higienis, keterbatasan dalam mengakses air bersih dan lokasi tempat tinggal.

Adapun pengeluaran pemerintah ini fokus untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga pada akhirnya akan berdampak kepada *stunting* yang ada di Indonesia. Program pencegahan *stunting* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia diprioritaskan pada ibu hamil dan anak-anak usia 0 - 2 tahun atau rumah tangga dengan seribu hari pertama kelahiran (1.000 HPK). Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi *stunting* di Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara. Dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang baik, akan mendorong gairah ekonomi untuk terus berkembang dan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan baru. Masyarakat dapat memiliki penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang tercukupi akan membuat potensi *stunting* terjadi akan lebih kecil. Penelitian yang dilakukan oleh tim World Bank Group menemukan hasil bahwa berinvestasi dalam intervensi pengurangan stunting memiliki beberapa manfaat salah satunya adalah bahwa setiap \$1 yang di investasikan dalam pengurangan *stunting* dapat menghasilkan keuntungan ekonomi sebesar \$11 (Sheekar et al., 2017).

Stunting dalam skala besar akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian, salah satunya adalah menghilangkan potensi ekonomi suatu negara di masa depan karena anak-anak adalah penerus bangsa yang harusnya terus dijaga dan diperhatikan. Stunting dalam skala besar juga akan menyebabkan naiknya biaya sosial, ini dapat meningkatkan kesenjangan sosial antar masyarakat yang membuat biaya pengeluaran untuk pengentasan kemiskinan dan biaya program-program kesejahteraan masyarakat juga akan ikut mengalami kenaikan. Oleh karena itu permasalahan stunting sama sekali tidak boleh dibiarkan, namun pemerintah perlu terus melakukan segala cara yang efektif dalam mereduksi prevalensi *stunting* yang ada di Indonesia.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka menarik untuk meneliti terkait dengan “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap *Stunting* melalui Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain :

1. Apakah pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan berpengaruh terhadap *Stunting* baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas sumber daya manusia di Indonesia?
2. Apakah pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan berpengaruh terhadap *Stunting* baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas sumber daya manusia di Indonesia?
3. Apakah pengeluaran pemerintah dalam bidang ekonomi berpengaruh terhadap *Stunting* baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas sumber daya manusia di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan terhadap *Stunting* baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas sumber daya manusia di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan terhadap *Stunting* baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas sumber daya manusia di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bidang ekonomi terhadap *Stunting* baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas sumber daya manusia di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Untuk penulis yaitu sebagai sarana pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah diampu selama masa perkuliahan.
2. Untuk akademis sebagai sarana pembelajaran dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
3. Untuk pemerintah yaitu sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan untuk mengurangi angka *stunting* di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Stunting

Balita Pendek (*Stunting*) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/ stunted) dan <-3 SD (sangat pendek / severely stunted), (Kemenkes, 2016). *Stunting* adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini menunjukkan status gizi yang kurang malnutrisi dalam jangka waktu yang lama kronis, (Candra, 2020). *Stunting* pada anak menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan dan kematian, gangguan pada perkembangan otak, gangguan terhadap perkembangan motorik dan terhambatnya pertumbuhan mental anak (Rahayu dkk., 2018).

Menurut WHO (2017) dampak yang ditimbulkan apabila seorang anak mengalami *Stunting* terbagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek yang akan dialami dapat meningkatkan kejadian kesakitan dan kematian serta menghambat proses perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak. Sedangkan dalam jangka panjang, anak akan memiliki postur tubuh yang tidak optimal (lebih pendek dari anak seusianya), meningkatnya risiko terkena obesitas, dan menurunnya produktivitas dan kapasitas kerja.

Tinggi badan berdasarkan umur rendah, atau tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seumurnya merupakan definisi *Stunting* yang ditandai dengan terlambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan

kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai dengan umur anak (WHO, 2018). Kejadian *stunting* pada anak merupakan suatu proses kumulatif, menurut beberapa penelitian, penyebab *stunting* mulai terjadi sejak kehamilan, masa kanak-kanak dan sepanjang siklus kehidupan. Proses terjadinya *Stunting* pada anak dan peluang peningkatan *Stunting* terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 menerbitkan pedoman untuk standar berat dan tinggi badan ideal anak Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut, tinggi dan berat badan anak ideal untuk usia 1-2 tahun dibedakan menurut jenis kelamin, yaitu:

Tabel 2.1

Tinggi dan berat badan ideal anak Indonesia usia 1 – 2 Tahun

Ukuran tinggi badan dan berat badan normal anak	Laki - laki usia 1-2 tahun	Perempuan usia 1-2 tahun
Tinggi Badan	75,7 cm – 87,1 cm	74 cm – 86,4 cm
Berat Badan	9,6 kg – 12,2 kg	8,9 kg – 11,5 kg

Stunting terlihat dari berat kurang atau underweight jika dilihat dari berat badan menurut umur (BB/U), pendek atau sangat pendek jika dilihat dari tinggi badan menurut umur (TB/U) dan kurus atau wasting jika dilihat dari berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Dalam hal ini, berat kurang dan kurus merupakan dampak masalah kekurangan gizi yang bersifat akut, sedangkan pendek atau sangat pendek merupakan manifestasi kekurangan gizi yang bersifat kronik (Kementrian Kesehatan, 2010).

Tabel 2.1 Ambang Batas Status Gizi Anak

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Panjang Badan Atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) Anak usia 0 – 60 bulan	Sangat pendek (<i>severely stunted</i>)	< -3 SD
	Pendek (<i>stunted</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Normal	- 2 SD sd + 3 Sd
	Tinggi ²	> +3 SD

Rumus Z- Score Menentukan Status Gizi Anak

Tinggi/Panjang Badan menurut umur (TB/U & PB/U)

- Jika TB/PB anak < median

$$(TB/U) = \frac{TB/PBanak - TB/PBmedian}{TB/PBmedian - (tabel - 1sd)}$$

- Jika TB/PB anak > median

$$(TB/U) = \frac{TB/PBanak - TB/PBmedian}{(tabel + 1sd) - TB/PBmedian}$$

- Jika TB/PB anak = median

$$(TB/U) = \frac{TB/PBanak - TB/PBmedian}{TB/PBmedian}$$

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keadaan *stunting* pada anak. Faktor penyebab *stunting* ini dapat disebabkan oleh faktor langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung dari kejadian *stunting* adalah asupan gizi dan adanya penyakit infeksi sedangkan penyebab tidak langsungnya adalah pola asuh, pelayanan kesehatan, ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi dan masih banyak lagi faktor lainnya (UNICEF, 2018).

Prendergast dan Humphrey (2014) yang meneliti sindrom *stunting* pada negara-negara berkembang menunjukkan hasil bahwa *stunting* pada anak-anak di negara berkembang disebabkan oleh berbagai faktor seperti gizi buruk, infeksi, sanitasi yang buruk, dan faktor-faktor sosial ekonomi. Oleh karena itu, intervensi yang holistik diperlukan untuk mencegah terjadinya *stunting*. Menurut Nisa (2018), isu *stunting* merupakan masalah kesehatan yang harus segera diatasi karena akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara seperti ketimpangan, kemiskinan dan juga pertumbuhan ekonomi. Pembangunan suatu negara sangatlah bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Jika generasi penerus bangsa terlahir sehat dan tumbuh dengan baik juga mendapatkan pendidikan yang optimal, maka generasi tersebut akan dapat menunjang kesuksesan pembangunan suatu bangsa.

2.1.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

Teori yang menjelaskan terkait hubungan kualitas sumber daya manusia dengan *stunting* adalah teori *human capital*. Teori *human capital* dikembangkan oleh seorang ekonom bernama Theodore W. Schultz (2010) yang menyatakan bahwa investasi pada kualitas SDM, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat memacu peningkatan produktivitas individu dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM yang baik tercermin dalam pendidikan dan kesehatan yang tinggi, dimana orang tua yang sehat dan berpengetahuan akan mengerti bagaimana memberikan perawatan dan nutrisi bagi anaknya. Teori *human capital* juga mengakui bahwa investasi pada kualitas sumber daya manusia pada masa anak-anak sangatlah berperan dalam menentukan kualitas hidup anak di masa depan.

Sumber daya didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada.

Sumber daya tidak memacu pada suatu benda atau substansi, melainkan pada suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenuhi kebutuhan dan kepuasan (Kulla dkk., 2018). Kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif, generatif dan inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti pengetahuan, kreativitas dan imajinasi, tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi otot dan sebagainya (Ndraha, 2012). Kualitas sumber daya manusia pada saat ini banyak dituntut dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. Oleh karena itu dalam dunia kerja kemampuan dan profesionalitas seseorang sangatlah penting. Masyarakat yang tidak mampu bersaing dalam dunia kerja pada akhirnya akan menjadi pengangguran dan menimbulkan efek domino terhadap berlangsungnya kehidupannya sendiri, seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan dan hidup yang layak.

Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai satu-satunya acuan dalam melihat kesejahteraan masyarakat, namun harus ada dimensi lain yang menjadi tolak ukur dalam menggambarkan kesejahteraan tersebut yaitu pembangunan. Pendapatan riil tidak lagi memadai sebagai ukuran utama kesejahteraan karena dibutuhkan berbagai indikator lain yang terintegrasi seperti tingkat kesehatan dan pendidikan (Ariansyah, 2018). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu tolak ukur kinerja pembangunan tersebut. IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi kesehatan dan dimensi pendidikan. IPM menjelaskan bagaimana cara penduduk memperoleh standar hidup yang layak, hidup sehat termasuk umur yang panjang dan pengetahuan.

Peningkatan pendidikan seseorang sering dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah yang akan diperoleh masyarakat terkhususnya pekerja dilihat dari produktivitasnya, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan. Semakin tinggi produktivitas pada akhirnya akan membuat ekonomi mengalami pertumbuhan (Julianto dan Utari, 2019).

Selain pendidikan, kesehatan juga memiliki peranan terhadap pertambahan pendapatan yang bisa diperoleh pekerja. Pengaruh kesehatan terhadap pendapatan diantaranya dengan perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan dan pengembangan potensi diri yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan (Lumbantoruan dan Hidayat, 2014).

Konsep atau definisi pembangunan manusia pada dasarnya mencakup pada dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan sebetulnya harus dianalisis serta dipahami bukan hanya dari sisi pertumbuhannya tapi juga dari sudut manusianya. Konsep pembangunan manusia pada umumnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Amartya Sen salah satu ekonom yang memperkenalkan konsep pembangunan sebagai kebebasan, dimana dalam bukunya ia menekankan bahwa pembangunan harus dilihat dari perspektif kualitas hidup manusia. Menurut Sen, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memungkinkan manusia untuk memperoleh kebebasan dari kemiskinan dan ketidakadilan (Sen Amartya, 2017).

Pembangunan sumber daya manusia secara fisik maupun mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan yang ada diantaranya berupa masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pada pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Harliyani dan Haryadi, 2016).

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran pemerintah setiap tahunnya dengan cara menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara tertentu (Sukirno, 2013).

Salah satu ekonom terkenal Amerika Serikat Richard Musgrave (1993) mengemukakan teorinya tentang pengeluaran pemerintah, dimana menurutnya pengeluaran pemerintah dibagi menjadi 3 jenis yaitu pengeluaran publik, transfer

publik dan subsidi publik. Pengeluaran publik meliputi pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang dan jasa publik, seperti jalan raya, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Transfer publik adalah pengeluaran yang digunakan untuk membantu kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan, seperti tunjangan sosial dan bantuan pengangguran. Sedangkan subsidi publik adalah pengeluaran yang digunakan untuk memberikan insentif atau bantuan kepada produsen dan konsumen dalam suatu industri tertentu. Adapun menurut Musgrave tujuan dari pengeluaran pemerintah tersebut adalah untuk efisiensi, efektivitas dan keadilan dalam penggunaan sumber daya pemerintah. Dalam teori ini, Musgrave (1993) juga memperkenalkan konsep pendapatan nasional dan pengeluaran nasional, dimana pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dengan tepat dapat menjadi salah satu instrument kebijakan fiskal yang sangat membantu dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial, seperti inflasi, pengangguran dan kemiskinan.

Alokasi pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi dapat berperan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan tenaga kerja yang sehat dan memiliki produktivitas yang baik, sehingga dapat membantu dalam memajukan keberlangsungan perekonomian suatu negara. Secara keseluruhan teori Musgrave menekankan pada pentingnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah haruslah dilihat sebagai salah satu investasi dalam perekonomian dan harus dibagi dalam alokasi sumber daya, distribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengklasifikasikan belanja pemerintah menurut fungsinya dibagi menjadi sebelas yaitu, fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan dan fungsi perlindungan sosial. Fungsi tersebut bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam pengelolaan keuangan negara.

1) Bidang Kesehatan

Pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Menurut WHO pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan mencakup semua pengeluaran pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Ini meliputi pengeluaran untuk pelayanan kesehatan, program kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengawasan dan regulasi sektor kesehatan.

2) Bidang Pendidikan

Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan merupakan pengeluaran pemerintah yang menjadi dasar pokok dalam proses pembangunan manusia. Menurut *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO): Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan mencakup semua belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan sistem pendidikan negara. Ini meliputi pengeluaran untuk pembangunan dan pemeliharaan

sarana pendidikan, upah guru, pengembangan kurikulum, pengadaan materi dan buku pelajaran, serta program-program pendidikan lainnya.

Menurut Pasal 1 butir 40 Undang-Undang No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas dasar UU No. 22 Tahun 2011 Tentang ABPN 2012, mengatakan bahwa anggaran dalam sektor pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi dalam pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga. Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer kedaerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. Untuk ingin membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah.

Pada umumnya pendidikan merupakan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia . Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan serta produktivitas. Dengan adanya bantuan dari pemerintah maka semua masyarakat dapat menikmati pendidikan yang layak terutama bagi masyarakat yang tergolong dalam garis kemiskinan. Investasi pemerintah dalam bidang pendidikan ini memberikan kesempatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya pada jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya dengan baik sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Maka dari itu

semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi masyarakat dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Winarti. A, 2014).

3) Bidang Ekonomi

Selain dalam bidang kesehatan dan pendidikan, pengeluaran pemerintah dalam bidang ekonomi juga ikut berperan secara tidak langsung dalam mengurangi *stunting*. Ketika perekonomian suatu negara lebih bergairan maka besar potensi lapangan pekerjaan akan lebih terbuka sehingga lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat. Masyarakat yang pada akhirnya memiliki pekerjaan akan mampu memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Mankiw (2012) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama akan semakin meningkat. Beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah berdasarkan teori Wagner adalah fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan, perbankan dan pembangunan. Teori Wagner didasarkan pada teori "*Organic of state*" yang dimana menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dari masyarakat lain.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan *Stunting*

Salah satu ahli yang meneliti hubungan antara kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kekurangan gizi pada anak adalah Sally Grantham-

McGregor (2007). Salah satu teori yang terkait dengan kerjanya adalah teori investasi awal (*early investment theory*), yang menekankan pentingnya intervensi kesehatan dan gizi pada periode awal kehidupan untuk mencegah masalah kekurangan gizi dan memastikan perkembangan optimal pada anak-anak. Sally Grantham-McGregor menyoroti pentingnya intervensi awal dalam mencegah kekurangan gizi dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Penelitiannya menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pada masa-masa awal kehidupan dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada kesehatan dan kemampuan kognitif anak-anak.

Negara maju pada umumnya memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga memiliki persentase *stunting* yang cenderung lebih kecil bila dibandingkan dengan negara yang masih berkembang. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari IPM suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ringkasan dari indikator tiga dimensi utama dalam pembangunan manusia yang berupa umur panjang dan hidup sehat, berpengetahuan, pendidikan dan standar hidup yang layak (UNDP, 2019). Berdasarkan pengertian tersebut maka semakin baik kualitas kesehatan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentunya akan tercermin dalam IPM.

Stunting merupakan kondisi dimana seorang anak mengalami masalah kekurangan gizi yang dalam jangka panjang yang akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan perkembangan kognitif seorang anak (Kemenkes 2018). IPM yang semakin tinggi akan merepresentasikan bahwa kualitas kesehatan di suatu negara tersebut cukup baik. Korelasinya dengan IPM yaitu ketika angka *stunting* meningkat, maka akan mengurangi angka harapan hidup seseorang atau sebaliknya, dengan meningkatnya IPM maka *stunting* akan semakin menurun

karena kualitas kesehatan, pendidikan dan kehidupan masyarakat cenderung semakin baik.

2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dalam Bidang Kesehatan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia dan *Stunting*

Alderman (2012) salah satu ekonom yang telah meneliti hubungan antara nutrisi dan pembangunan manusia. Alderman menyatakan bahwa pentingnya investasi pemerintah dalam program kesehatan dan gizi untuk mencegah *Stunting* dan memastikan perkembangan anak yang optimal.

Salah satu fungsi pemerintah adalah menjamin standar hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yakni merencanakan, mengatur, menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan UU Kesehatan, sumber daya di bidang kesehatan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah terkait dengan anggaran kesehatan, tenaga kesehatan, pembekalan kesehatan, alat kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut bersumber dari APBN dan APBD yang sudah ditetapkan untuk bidang kesehatan.

Pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan akan memberikan dampak positif bagi kehidupan yang lebih layak untuk masyarakat baik dalam bentuk pemberian fasilitas yang memadai maupun keterjangkauan biaya pelayanan kesehatan.

2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia dan *Stunting*

Salah satu ekonom terkenal yaitu Theodore W. Schultz (2010) menyatakan pentingnya investasi pemerintah dalam bidang pendidikan untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya bantuan dari pemerintah semua masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang layak terutama bagi masyarakat miskin. Investasi ini memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan.

Menurut Fahrudin (2014) tujuan utama kesejahteraan sosial meliputi pemenuhan kebutuhan sehari-hari yaitu sandang, pangan, papan dan akses pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau. Serta melakukan penyesuaian diri dengan masyarakat sekitar misalnya meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang layak. Ada banyak hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa pengeluaran pemerintah sangat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Whardana dkk (2021), menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan sangat berpengaruh terhadap rata-rata lama bersekolah seorang anak dan secara jangka panjang dalam skala yang besar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan mengurangi tingkat stunting yang ada di Indonesia.

2.2.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi dengan Kualitas Sumber Daya Manusia dan *Stunting*

Sukirno (2013) menyatakan pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat .

Salah satu cara menjaga kesejahteraan masyarakat adalah melalui alokasi dana pemerintah yang digunakan untuk berbagai fungsi seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Kualitas perekonomian suatu bangsa dapat dilihat dari nilai pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sumber peningkatan kualitas tersebut diperoleh dari belanja untuk kesehatan, belanja pendidikan, dan fasilitas-fasilitas lain penunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia (Lonni dkk, 2018).

Beberapa bidang penting yang dibiayai oleh pemerintah adalah membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat juga membiayai berbagai jenis infrastruktur penting dalam pembangunan. Pengeluaran pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara sehingga semakin besar jumlah pengeluaran pemerintah maka akan memberikan dampak yang positif untuk jalannya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Bawinti dkk, (2018) menemukan bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah dan investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik akan mencerminkan kualitas sumber daya manusianya, karena yang menggerakkan perekonomian adalah manusia itu sendiri. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang cukup akan memberikan kesempatan untuk dapat mengkonsumsi makanan yang lebih sehat dan bergizi sehingga kemungkinan untuk terkena *stunting* akan lebih kecil.

2.3 Studi Empiris

Nasrun dan Rahmadania (2018) melakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat apakah ada pengaruh antara indikator keberhasilan pembangunan dengan tingginya tingkat prevalensi *stunting* di Indonesia. Penelitian ini

merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS dan Kementerian Kesehatan RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator pembangunan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan ekonomi dan IPM memiliki pengaruh terhadap prevalensi *stunting* di Indonesia meskipun tidak besar dan signifikan.

Ibrahim dan Faramita (2015) melakukan penelitian dalam skala kecil untuk melihat Hubungan Faktor Sosial Ekonomi keluarga dengan Kejadian *stunting* Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Barombong Kota Makassar Tahun 2014. Analisis data dalam penelitian ini secara keseluruhan diolah menggunakan program SPSS meliputi univariat dan analisis bivariat. Adapun analisa statistik menggunakan uji *cji-square*. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pendidikan seorang Ibu berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian *Stunting* pada anak usia 24-59 bulan di Puskesmas Barombong.

Ni'mah dan Nadhiroh (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian *stunting* pada balita. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan mengambil sampel random untuk balita usia 24-59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tanah Kali Kelinding. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *stunting* sedangkan variabel bebas adalah pendapatan keluarga, pendidikan orang tua, pengetahuan gizi ibu dan jumlah anggota keluarga. Adapun hasil penelitian ini menemukan hubungan antara pendapatan keluarga dengan kemungkinan resiko terjadinya *stunting*, dimana semakin rendahnya pendapatan maka potensi untuk terjadinya *stunting* akan lebih besar karena adanya kesulitan dalam pemenuhan gizi untuk balita. Pendidikan orang tua dan pengetahuan gizi ibu juga berpengaruh dalam peningkatan *stunting* dimana ibu dengan pendidikan tinggi mempunyai pengetahuan yang lebih luas tentang praktik perawatan anak serta mampu

menjaga dan merawat lingkungannya agar tetap bersih dan pengetahuan akan gizi mampu membantu dalam pemilihan makanan yang akan dikonsumsi sehari-hari.

Fadhilah dkk, (2022) melakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara *stunting*, Kemiskinan dan ASI Eksklusif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menggunakan metode analisis data panel untuk rentang waktu tahun 2019-2021. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel *stunting* memiliki pengaruh negatif terhadap pembangunan manusia dengan nilai t hitung -0,71. Hal ini menjelaskan bahwa dengan semakin naiknya angka *stunting* di Indonesia maka akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia semakin menurun. Variabel kemiskinan dan ASI Eksklusif sendiri memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika angka kemiskinan mengalami kenaikan maka angka IPM juga akan mengalami kenaikan.

Hal ini tidak sejalan dengan literatur terdahulu seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar dkk., pada tahun 2019 dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan dimana meningkatnya angka IPM dapat membantu mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi adanya hubungan positif antara kemiskinan dengan IPM dapat terjadi dikarenakan jumlah penduduk miskin yang terus meningkat dari kuartal pertama tahun 2019 hingga kuartal pertama tahun 2021 pada masa pandemi covid-19. Walaupun angka IPM pada tahun 2019 – 2021 mengalami kenaikan, namun angka kemiskinan meningkat pesat pada tahun 2020 hingga 2021. Hal tersebut yang menjadi alasan sehingga hasil

perhitungan memperlihatkan kemiskinan dan IPM memiliki hubungan yang positif.

Sutriyawan dkk, (2021) melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara jenis kelamin, golongan umur dan sosial ekonomi terhadap *Stunting* yang terjadi di Wilayah Kerja Puskesmas Citarep. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara jenis kelamin dan golongan umur seorang anak terhadap kejadian *stunting*, namun variabel sosial ekonomi memiliki pengaruh terhadap kejadian *stunting* yang ada di Puskesmas Citarep, Jawa Barat. Penelitian ini menemukan bahwa anak dengan sosial ekonomi keluarga yang rendah memiliki kemungkinan kejadian *stunting* hingga 2 kali lipat dari pada anak yang berasal dari keluarga mampu. Untuk memenuhi kebutuhan gizi tentunya akan membutuhkan biaya yang cukup besar, jika keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi anak, maka anak akan punya kemungkinan untuk terkena *stunting* lebih besar.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

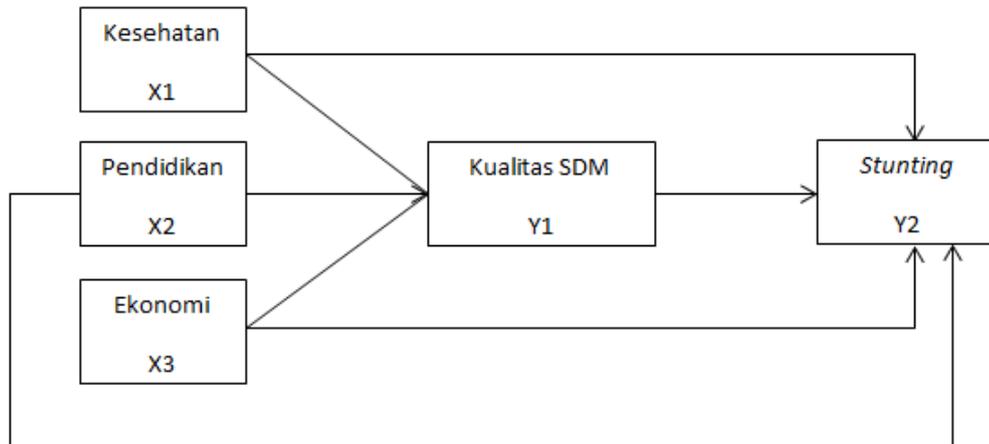
Manusia merupakan pemeran utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu penentu akan terjadinya pertumbuhan perekonomian kearah yang lebih baik. Berdasarkan tujuan negara dalam UUD tahun 1945 pada alinea keempat, pemerintah mengemban tugas yang sangat penting yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melaksanakan banyak program dan kegiatan di semua bidang pelayanan publik, salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan anggaran pengeluaran pemerintah (Mongan, 2019).

Pengeluaran pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Semakin baik dan sejahteranya kehidupan masyarakat dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan tentunya akan memberikan dampak yang baik juga untuk pemenuhan kebutuhan dan membantu memperkecil kemungkinan terkena *stunting*. Kesejahteraan masyarakat akan berdampak terhadap tingkat *stunting* dimana semakin sejahtera kehidupan masyarakat maka *stunting* akan semakin rendah.

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor terpenting dalam melihat seberapa baik kualitas manusia di negara tersebut. Kualitas sumber daya manusia tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang menjadi indikator pembangunan ekonomi memiliki peranan penting untuk melihat seberapa baik kualitas hidup, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara maka semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Negara dengan kualitas sumber daya manusia yang baik pada umumnya akan memiliki resiko untuk terkena *stunting* lebih kecil bila dibandingkan dengan negara yang kualitas sumber daya manusianya rendah.

Pengeluaran pemerintah memiliki peran yang penting dalam membantu memajukan perekonomian suatu negara, kualitas pelayanan yang semakin baik dari segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya akan semakin menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia sehingga perekonomian akan semakin bergairah dan berdampak terhadap terbukanya lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini tentunya memberikan dampak yang positif untuk pengurangan *Stunting* di Indonesia dimana masyarakat yang memiliki pekerjaan yang layak pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal gizi sehingga dapat membantu dalam mengurangi dan mengentaskan permasalahan *stunting* di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka pikir penelitian dapat dirumuskan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Diduga pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan berpengaruh terhadap *stunting* baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas sumber daya manusia.
2. Diduga pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan berpengaruh terhadap *stunting* baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas sumber daya manusia.
3. Diduga pengeluaran pemerintah dalam bidang ekonomi berpengaruh terhadap *stunting* baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas sumber daya manusia.